

# **ANALISIS IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA**

## **[ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT ON REGIONAL GOVERNMENT LEVEL IN INDONESIA]**

**Igif G. Prihanto**

Peneliti Bidang Manajemen Sistem Informasi, Lapan

e-mail: igprihanto@yahoo.com

Diterima 16 Februari 2012; Disetujui 14 Juni 2012

### **ABSTRACT**

Since Presidential Instruction No.3/2003 have issued, each Ministry, Non Ministries, Provincial and District/Municipality has implemented and developed e-Government. The problem are there differences in the level of achievement of the implementation of e-Government in Indonesia for aspects of the policy, institutional, infrastructure, applications, and planning. This study used data on the ranking of e-Government in Indonesia provincial government level from the book of Indonesia Communication and Information-Whitepaper 2010 that issued by Data center of the Ministry of Communications and Information Technology. The purpose of this study was to determine differences in the level of achievement of the implementation of e-Government at the provincial government of Indonesia and the strategy development of e-Government of his. The method of analysis using Friedman statistical test. Research results: (1) There are differences in the level of achievement of the implementation of e-Government in Indonesia on 27 provincial for aspects of the policy, institutional, infrastructure, applications, and planning. (2) The strategy development of e-Government her, by way of: (a) Developing e-Government blueprint clearly, (b) Develop appropriate organizational structural characteristics of each provincial government, (c) Develop a communications network infrastructure and adequate information. (d) Establishing various types and forms of the applications e-Government corresponding provincial main task, and (e) Planning for ICT governance and management which an integrated, integrated and sustainable. (3) Lapan need to: (a) Developing blueprint e-Government of Lapan clearly, (b) Improving the institutional level ICT Lapan to be Echelon II, (c) Establish communications network infrastructure and adequate information, (d) Establish a variety of applications to support functions e-Government, and (e) Plan the development of e-Government of Lapan that integrated, integrated and sustainable.

Key World: *E-Government*, *Uji Friedmen*

### **ABSTRAK**

Sejak dikeluarkan Inpres Nomor 3/2003, setiap Kementerian, Non Kementerian, Provinsi, dan Kabupaten/Kotamadya telah mengimplementasikan dan mengembangkan *e-Government*. Permasalahannya adalah apakah terdapat perbedaan dalam implementasi *e-Government* pada pemprov di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Penelitian ini menggunakan data pemeringkatan *e-Government* pada pemprov di Indonesia dari Buku Komunikasi dan Informasi Indonesia *Whitepaper* 2010 terbitan Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada pemprov di Indonesia dan strategi pengembangan *e-Government*-nya. Metode analisisnya menggunakan uji statistik

Friedman. Hasil penelitiannya: (1) Tingkat capaian implementasi *e-Government* pada 27 Pemprov di Indonesia memiliki perbedaan dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. (2) Strategi pengembangan *e-Government*-nya, dengan cara: (a) menyusun *blueprint e-Government* dengan jelas, (b) menyusun organisasi struktural sesuai karakteristik masing-masing Pemprov, (c) mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi yang memadai. (d) membangun berbagai jenis dan bentuk aplikasi *e-Government* sesuai tugas pokok Pemprov, dan (e) merencanakan tata kelola atau manajemen ICT secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. (3) Lapan perlu: (a) menyusun *blueprint e-Government* Lapan dengan jelas, (b) meningkatkan kelembagaan ICT Lapan setingkat Eselon II, (c) membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi yang memadai, (d) membangun berbagai aplikasi untuk mendukung fungsi *e-Government*, dan (e) merencanakan pengembangan *e-Government* Lapan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

Kata Kunci: *E-Government*, Uji Friedman

## 1 PENDAHULUAN

*E-Government* dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi, internet dan komunikasi bergerak oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya (Bank Dunia, 2002). Dalam prakteknya *e-Government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (Sufianti, Ely, 2007). Di negara-negara maju, *e-Government* merupakan hasil transformasi mekanisme interaksi birokrasi dengan masyarakat yang menjadi lebih bersahabat. Demikian halnya di negara berkembang, banyak pengambil kebijakan yakin bahwa pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dapat diwujudkan melalui *e-government* (Holle, Erick S., 2011). Beberapa contoh implementasi *e-government* berupa pelayanan pendaftaran warga negara, antara lain pendaftaran kelahiran, pernikahan, dan penggantian alamat, perhitungan pajak (pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan *custom duties*), pendaftaran bisnis, perizinan kendaraan dan lain sebagainya (Yalia, Mulyono, 2011).

Di Indonesia, pelaksanaan *e-Government* didasarkan atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pelaksanaan *e-government* berangkat dari pemikiran tentang pertimbangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan yang diyakini akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Sosiawan, Edwi Arief, 2008). Inpres ini memuat langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi/lembaga guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*, dan merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing. Dalam implementasinya, Inpres ini telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional (Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003).

Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dieliminir melalui pemanfaatan *e-Government* menjadi lebih fleksibel dan lebih

berorientasi pada kepuasan pengguna (Hartono; Dwiarto Utomo; Edy Mulyanto, 2010). Oleh karena itu melalui implementasi *e-Government*, banyak keuntungan yang diperoleh untuk peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik sekaligus memberikan keterpaduan antar instansi dalam pelaksanaan *e-Government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik (Yalia, Mulyono, 2011). Disamping itu juga banyak manfaat lain yang dapat diambil dari implementasi *e-Government*, yaitu: (a) menurunkan biaya administrasi; (b) meningkatkan kemampuan respons terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (c) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPNK pada semua tingkatan; (d) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (e) sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut (Satriya, Eddy, 2006).

Dalam perkembangannya, implementasi *e-Government* di kalangan pemerintahan kini menjadi sebuah tren. Hampir seluruh jenis aplikasi yang digunakan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi, yang selanjutnya akan dipergunakan oleh pemerintah atau *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan (Karniawati; Nia; Romi Rahmadani, 2011). *E-Government* menawarkan pelayanan publik bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. *E-Government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien (Hartono; Dwiarto Utomo; Edy Mulyanto, 2010). Menyadari akan besarnya manfaat *e-Government* tersebut, saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengimplementasikan *e-Government*, terlihat dari adanya

beberapa pemerintah daerah provinsi memperlihatkan kemajuan implementasi *e-Government* yang cukup berarti (Satriya, Eddy, 2006).

Dari penjelasan implementasi *e-Government* yang telah dikemukakan di atas, ternyata ada pemerintah daerah provinsi (pemprov) yang melaju dengan cepat tetapi ada juga yang masih lambat dalam implementasinya, bahkan ada yang masih baru memahami penerapan *e-Government* hanyalah sebatas membangun *website* (Junaidi, 2011). Kondisi ini terjadi karena pembangunan dan pengembangan *e-Government* tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kesiapan dari masing-masing pemerintah daerah yang bersangkutan. Permasalahannya adalah adakah perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi (pemprov) di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan serta bagaimana strategi pengembangan *e-Government*-nya?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada pemprov di Indonesia dan strategi pengembangan *e-Government*-nya dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan dalam implementasi *e-Government* pada pemprov di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi Lapan dalam merumuskan kebijakan dalam implementasi dan pengembangan *e-Government* dalam mendukung pengembangan *e-Government* Indonesia pada masa mendatang.

## 2 TINJAUAN LITERATUR

### 2.1 Pengertian *E-Government*

*E-Government* adalah wahana teknologi informasi yang mampu menghasilkan manajemen dan jaringan

pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara cepat, akurat, dan tepat waktu dalam bidang ekonomi, politik, administratif dan bidang pendukung lainnya (Sembiring, Irwan; Jazi Eko Istiyanto, 2005). *E-Government* bertujuan menyampaikan layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Pada umumnya, semakin banyak layanan *online* yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap *e-Government* (Rahardjo, Budi, 2001). *e-Government* (juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Sosiawan, Edwi Arief, 2012).

Pada intinya pengertian *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), dan G2G (*Government to Government*) (Hasibuan, Zainal A, 2012).

## **2.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government***

Visi *e-Government* Indonesia adalah meningkatkan kinerja di lingkungan pemerintah sektoral dan regional, melaksanakan koordinasi dan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas layanan publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance* (Hasibuan, Zainal A., 2012). Adapun misi *e-Government* Indonesia, meliputi: (a) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas di seluruh lingkungan pemerintah sektoral dan regional; (b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; (c) Meningkatkan

koordinasi antar instansi; dan (d) Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tujuan dan manfaat *e-Government* adalah (a) Meningkatkan produktivitas lembaga pemerintahan; (b) Membantu pencapaian *outcome* tertentu bagi lembaga pemerintahan; (c) Membantu pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan; (d) Membantu kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat; dan (e) Mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan.

Indonesia melalui pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Pengembangan *e-Government*, yang dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam pengembangan *e-Government* di Indonesia. Inpres tersebut merupakan suatu regulasi yang berisikan panduan tentang Strategi Pengembangan *e-Government* yang dilengkapi dengan berbagai: panduan tentang *e-Government*, panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah, panduan manajemen sistem dokumen elektronik pemerintah, panduan rencana induk pengembangan *e-Government* lembaga, panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah, panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM *e-Government*. Dalam implementasinya, berbagai panduan yang telah dihasilkan oleh Kemkominfo pada tahun 2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan *e-Government* di pusat dan daerah (Satriya, Eddy., 2006).

Pengembangan *e-Government*, dapat dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi sebagai berikut:

a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat luas. Sasarannya adalah perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau.

Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

- b. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar, seperti *e-billing*, *e-procurement*, *e-reporting* yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-Government*. Ini artinya pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
- e. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Dalam pengembangan *e-Government*, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan, yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

### 3 METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa tingkat capaian implementasi *e-Government* pada 27 pemerintah daerah provinsi (pemprov) di Indonesia yang didasarkan pada 5 (lima) aspek, yakni kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Tingkat capaian ini dapat dilihat dari indikator aspek yang digunakan, yakni kebijakan (tersedianya renstra sebagai dokumen resmi untuk acuan pengembangan), kelembagaan (tersedianya struktur organisasi yang lengkap dengan tugas pokok dan fungsi), infrastruktur (terbangunnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi), aplikasi (terbangunnya berbagai aplikasi pendukung fungsi *e-Government*), dan perencanaan (tatalaksana ICT dan manajemen perencanaan *e-Government*).

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara mengambil data pemeringkatan *e-Government* pada pemprov di Indonesia dari Ditjen APTEL (2010) dalam Buku Komunikasi dan Informasi Indonesia *Whitepaper* 2010 yang dipublikasikan oleh Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2010). Data ini disusun dan dilakukan pengkategorian dengan cara memberikan skor pada kategori yang di mulai dari sangat kurang sampai dengan sangat baik. Dengan perincian bahwa interval skor antara 1,0 sampai dengan 1,49 untuk kategori sangat kurang baik; interval skor antara 1,5 sampai dengan 2,49 untuk kategori kurang baik; interval skor antara 2,5 sampai dengan 3,49 untuk kategori baik; dan interval skor antara 3,5 sampai dengan 4,0 untuk kategori sangat baik.

#### 3.2 Metode Analisis

Metode analisis menggunakan statistik nonparametrik dengan uji Friedman. Uji Friedman ini berlaku untuk k sampel berpasangan dengan

data yang berskala sekurang-kurangnya ordinal ( $k > 2$ ). Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Uji Friedman ini dipergunakan sebagai alternatif dari teknik analisis *variance* dua arah (*two way analysis of variance*), bila uji ini tidak memerlukan anggapan bahwa populasi yang diteliti berdistribusi normal dan mempunyai *variance* yang homogen. Oleh karena itu lengkapnya Uji ini dinamakan analisis *variance* jenjang dua arah Friedman, dan dikenal dengan Uji  $\chi^2_r$ . Untuk uji Friedman, data penelitian disusun ke dalam suatu tabel dua arah yang mempunyai  $n$  baris dan  $k$  kolom. Baris menunjukkan subyek dan kolom menunjukkan kondisi. Data kondisi untuk masing-masing subyek disusun dalam bentuk jenjang (*ranking*). Selanjutnya uji Friedman adalah untuk menentukan apakah jumlah keseluruhan jenjang ( $R_j$ ) berbeda nyata. Apabila banyaknya baris dan atau kolom tidak terlalu kecil maka nilai  $\chi^2_r$  akan mengikuti distribusi Chi-Square dengan derajat bebas  $k-1$ . Nilai  $\chi^2_r$  inilah yang dinamakan uji Friedman, dengan formulasi matematik sebagai berikut (Djarwanto, 1995):

$$\chi^2_r = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^k (R_j)^2 - 3n(k+1) \quad (3-1)$$

Keterangan:

$k$  =banyak kolom yang menunjukkan kondisi

$n$  =banyak baris menunjukkan subyek

$R_j$  =jumlah nilai ranking ke- $j$  untuk kolom

$\sum_{j=1}^k$  =jumlah seluruh  $k$  sampel mendekati distribusi Chi-Kuadrat dengan derajat kebebasan  $(db)=k-1$

Pada pengujian perbedaan ini, dilakukan pengkonversian data ke dalam suatu tabel yang terdiri  $n$  baris dan  $k$  kolom. Data pengkonversian ini, selanjutnya digantikan dengan rankingnya dalam satu rangkaian (dalam satu baris). Data yang terbesar digantikan dengan ranking satu, yang setingkat di bawah yang

terbesar dengan ranking dua, dan seterusnya hingga ranking yang terkecil. Apabila data tersebut memiliki nilai ranking yang sama, maka nilai rankingnya di rata-rata.

Pengambilan kesimpulan dilakukan bahwa apabila nilai  $\chi^2_r$  pada persamaan (3-1) lebih besar atau sama dengan nilai dari  $\chi^2_{tabel}$  untuk derajat kebebasan  $(db) = (r-1)(k-1)$  dan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak pada tingkat signifikan tersebut dan  $H_1$  diterima. Sebaliknya, apabila nilai  $\chi^2_r$  lebih kecil dari nilai  $\chi^2_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima pada tingkat signifikan tersebut dan  $H_1$  ditolak.

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada pemprov di Indonesia secara kuantitatif dari masing-masing aspek, mulai dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil

Dari 27 pemprov di Indonesia, terlihat ada 7 (tujuh) pemprov yang tingkat capaiannya telah berhasil dengan baik (Jatim, DIY, Jabar, DKI Jakarta, Kaltim, Jateng, NTT), 15 pemprov kurang berhasil dengan baik (Riau, Banten, Papua Sumsel, Bali, Lampung, Gorontalo, Sumbar, Jambi, Sumut, NTB, Sulsel, NAD, Papua Barat, Kepri), dan 5 (lima) pemprov sangat kurang berhasil dengan baik (NAD, Bengkulu, Kalsel, Sulbar, Babel). Adapun untuk aspek: (a) kebijakan, pemprov Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta, Kaltim, Jateng, dan NTT ternyata tingkat capaian implementasi *e-Government*-nya relatif jauh lebih baik dibanding dengan pemprov lainnya, (b) kelembagaan, pemrov Jatim, DIY, Jabar, DKI Jakarta, Kaltim, dan NTT ternyata tingkat capaian implementasi *e-Government*-nya relatif jauh lebih baik dibanding dengan pemprov lainnya; (c) infrastruktur, pemprov Jatim, DIY,

Jabar, DKI Jakarta, Kaltim, Jateng, dan Sumsel ternyata tingkat capaian implementasi *e-Government*-nya relatif jauh lebih baik dibanding dengan pemprov lainnya, (d) aplikasi, pemprov Jatim, DIY, Jabar, DKI Jakarta, Kaltim, Jateng, NTT, Bali, dan Sumbar ternyata tingkat capaian implementasi *e-Government*-nya

relatif jauh lebih baik dibanding dengan pemprov lainnya, dan (e) perencanaan, pemprov Jatim, DIY, Jabar, DKI Jakarta, Kaltim, Jateng, Banten, Papua, dan Sumsel ternyata tingkat capaian implementasi *e-Government*-nya relatif jauh lebih baik dibanding dengan pemprov lainnya.

Tabel 4-1: DATA TINGKAT CAPAIAN IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* BERDASARKAN PEMPROV DI INDONESIA

No.	PEMPROV	ASPEK IMPLEMENTASI <i>E-GOVERNMENT</i>				
		Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan
1	Jawa Timur	3,33	3,20	3,05	3,22	3,25
2	DI Yogyakarta	3,29	3,07	2,76	3,26	2,92
3	Jawa Barat	2,58	3,13	3,24	3,22	2,83
4	DKI Jakarta	2,75	2,87	3,10	2,59	3,08
5	Kalimantan Timur	2,79	2,93	2,76	2,37	3,17
6	Jawa Tengah	2,54	2,27	2,76	2,59	2,58
7	Nusa Tenggara Timur	2,79	2,60	2,48	2,59	2,25
8	Riau	2,29	2,40	2,10	2,43	2,25
9	Banten	2,13	2,20	1,86	2,11	2,75
10	Papua	2,08	2,02	2,43	1,70	2,50
11	Sumatra Selatan	1,83	1,90	2,57	1,90	2,50
12	Bali	1,96	2,27	1,86	2,67	1,33
13	Lampung	1,96	2,47	1,71	2,32	1,50
14	Gorontalo	2,00	2,20	2,00	2,22	1,50
15	Sumatra Barat	2,13	2,20	1,67	2,70	1,00
16	Jambi	2,38	2,33	1,81	2,04	1,00
17	Sumatra Utara	1,71	1,93	2,14	2,19	1,08
18	Nusa Tenggara Barat	1,92	1,87	1,86	1,70	1,00
19	Sulawesi Selatan	1,38	1,87	1,90	1,41	1,33
20	Sulawesi Tenggara	1,75	1,00	1,33	1,15	1,67
21	Nanggro Aceh Darusalam	1,58	1,20	1,67	1,56	1,83
22	Papua Barat	1,71	1,87	1,52	1,67	1,00
23	Bengkulu	1,13	1,80	1,52	1,89	1,00
24	Kepri	1,42	1,27	1,38	1,59	2,10
25	Kalimantan Selatan	1,08	1,80	1,43	1,52	1,00
26	Sulawesi Barat	1,29	1,67	1,24	1,30	1,00
27	Bangka Belitung	1,08	1,00	1,57	1,56	1,08
Rata-rata		1,87	2,07	1,95	2,01	1,75

Sumber: Buku Komunikasi dan Informatika Indonesia Whitepaper 2010, hal. 53 (diolah)

Tabel 4-2: RANKING TINGKAT CAPAIAN IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* PADA PEMPROV DI INDONESIA BERDASARKAN ASPEK

NO	PEMPROV	Ranking Kebijakan	Ranking Kelembagaan	Ranking Infrastruktur	Ranking Aplikasi	Ranking Perencanaan
1	Jawa Timur	1	4	5	3	2
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	3	5	2	4
3	Jawa Barat	5	3	1	2	4
4	DKI Jakarta	4	3	1	5	2
5	Kalimantan Timur	3	2	4	5	1
6	Jawa Tengah	4	5	1	2	3
7	Nusa Tenggara Timur	1	2	4	3	5
8	Riau	3	2	5	1	4
9	Banten	3	2	5	4	1
10	Papua	3	4	2	5	1
11	Sumatera Selatan	5	3,5	1	3,5	2
12	Bali	3	2	4	1	5
13	Lampung	3	1	4	2	5
14	Gorontalo	3,5	2	3,5	1	5
15	Sumatera Barat	3	2	4	1	5
16	Jambi	1	2	4	3	5
17	Sumatera Utara	4	3	2	1	5
18	Nusa Tenggara Barat	1	2	3	4	5
19	Sulawesi Selatan	4	2	1	3	5
20	Sulawesi Tenggara	1	5	3	4	2
21	Nanggro Aceh Darusalam	3	5	2	4	1
22	Papua Barat	2	1	4	3	5
23	Bengkulu	4	2	3	1	5
24	Kepri	2	5	3	1	5
25	Kalimantan Selatan	4	1	3	2	5
26	Sulawesi barat	3	1	4	2	5
27	Bangka Belitung	3,5	5	1	2	3,5
<b>Jumlah Ranking</b>		R <sub>1</sub> =78	R <sub>2</sub> =74,5	R <sub>3</sub> =82,5	R <sub>4</sub> =70,5	R <sub>5</sub> =100,5

#### 4.2 Analisis

Pengujian perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada pemprov di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan akan dilakukan melalui uji statistik Fridmen dengan memberikan hipotesis nihil ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) sebagai berikut:

$H_0$  adalah tidak terdapat perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada pemprov di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

$H_1$  adalah terdapat perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada pemprov di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Sebelum dilakukan pengujian, data tingkat capaian implementasi *e-Government* tersebut dikonversi terlebih dahulu (Tabel 4-2). Dari hasil konversi tersebut diperoleh nilai yang digunakan untuk perhitungan dalam pengujian Friedmen, yaitu banyaknya pemprov yang merupakan subyek= $n=27$ , banyak kondisi yang merupakan banyak aspek= $k=5$ , dan  $R_j$  adalah jumlah nilai ranking



dari tingkat capaian implementasi *e-Government* pada 27 pemprov dari masing-masing aspek  $R_1=78$ ,  $R_2=74,5$ ,  $R_3=82,5$ ,  $R_4=70,5$  dan  $R_5=100,5$ .

Dengan memasukkan nilai  $n$ ,  $k$ , dan  $R_j$  ke formulasi Uji Friedman pada persamaan (3-1) diperoleh  $\chi^2_r = 26,923$ . Nilai ini ternyata lebih besar dari nilai Chi-Kuadrat tabel  $\chi^2_{\alpha,k} = 9,488$  untuk derajat kebebasan (db) =  $(k-1)$  dengan tingkat signifikan  $\alpha=0,05$ . Ini berarti hipotesis nihil  $H_0$  ditolak pada tingkat signifikan tersebut dan hipotesis alternatif  $H_1$  diterima. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada pemprov di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif terhadap tingkat capaian implementasi *e-Government* pada 27 pemprov di Indonesia dari masing-masing aspek untuk memperlihatkan perbedaan tersebut, yaitu sebagai berikut:

(a) **Aspek Kebijakan**, dari 27 pemprov di Indonesia ternyata ada sebanyak 25,9% pemprov telah berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, hal ini terlihat dari tingkat capaiannya yang berada dalam kategori baik (Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta, Kaltim, Jateng, dan NTT). Kondisi ini terjadi karena pemprov tersebut telah memiliki *blueprint* atau renstra yang merupakan dokumen resmi dan berkekuatan hukum, dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan arah dan tujuan implementasi *e-Government* di lingkungan pemprovnya. Meskipun terdapat keberhasilan, namun ternyata masih ada sekitar 51,8% pemprov lain yang belum berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, karena tingkat capaiannya masih berada dalam kategori kurang baik (Riau, Banten, Papua, Sumsel, Bali, Lampung, Gorontalo, Sumbar, Jambi,

Sumut, NTB, Sulawesi Tenggara, NAD). Disamping itu, juga masih ada 22,2% pemprov yang justru sangat kurang berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, karena tingkat capaiannya yang masih berada dalam kategori yang kurang berhasil dengan baik (Sulsel, Bengkulu, Kepri, Kalsel, Sulbar, dan Balbel). Kondisi ini terjadi kemungkinan karena pemprov tersebut tidak didukung dengan *blueprint* atau renstra sebagai dokumen resmi yang berkekuatan hukum, sehingga tidak atau belum ada acuan yang dapat digunakan untuk menentukan arah dan tujuan dalam implementasi *e-Government*. Hal ini yang mengakibatkan program kerja dan tata cara implementasi *e-Government* di lingkungan pemprov tersebut menjadi tidak terarah, kurang efisien dan kurang efektif.

(b) **Aspek Kelembagaan**, dari 27 pemprov di Indonesia ternyata ada sebanyak 22,2% pemprov telah berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, hal ini terlihat dari tingkat capaiannya berada dalam kategori baik (Jatim, DIY, Jabar, DKI Jakarta, Kaltim, dan NTT). Kondisi ini terjadi karena pemprov tersebut telah memiliki organisasi struktural yang lengkap dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, jenjang karier, dan status kepegawaian serta kewenangan yang cukup di lingkungan pemprovnya. Meskipun terdapat keberhasilan, namun ternyata masih ada sekitar 62,9% pemprov di Indonesia yang belum berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, karena tingkat capaiannya masih berada dalam kategori kurang baik (Jateng, Riau, Banten, Papua, Sumsel, Bali, Lampung, Gorontalo, Sumbar, Jambi, Sumut, NTB, Sulsel, Papua Barat, Bengkulu, Kalsel, dan Sulbar). Disamping itu, masih ada 14,8% pemprov yang justru kurang berhasil dalam implementasi *e-*

*Government*, karena tingkat capaiannya berada dalam kategori yang kurang berhasil dengan baik (Sultra, NAD, Kepri, dan Balbel). Kondisi ini kemungkinan karena pemprov tersebut tidak atau belum memiliki struktur organisasi yang berkekuatan hukum, sehingga belum atau tidak ada yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan implementasi *e-Government*. Hal ini yang mengakibatkan Pemprov tersebut tidak dapat melakukan tata kelola ICT untuk mendukung pengembangan dan implementasi ICT *e-Government* di lingkungannya.

- (c) **Aspek Infrastruktur**, dari 27 pemprov di Indonesia ternyata ada sebanyak 25,9% pemprov telah berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*. Hal ini terlihat dari tingkat capaiannya berada dalam kategori baik (Jatim, DIY, Jabar, DKI Jakarta, Kaltim, Jateng, dan Sumsel). Kondisi ini terjadi karena pemprov tersebut berhasil membangun infrastruktur implementasi *e-Government* dengan sangat baik, sehingga mampu memberikan pelayanan publik, menyediakan dan membangun situs untuk meluaskan informasi pemerintah, memberikan layanan interaksi (situs interaktif dengan publik) dan layanan transaksi elektronik (situs transaksi pelayanan publik, interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain). Meskipun terdapat keberhasilan, namun ternyata masih ada sekitar 59,3% pemprov di Indonesia yang belum berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, karena tingkat capaiannya masih berada dalam kategori kurang baik (Riau, Banten, Papua, Bali, Lampung, Gorontalo, Sumbar, Jambi, NTB, Papua Barat, Sulsel, NAD, dan Bengkulu). Disamping itu, masih ada 14,8% pemprov yang justru sangat kurang berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, karena tingkat capaiannya

berada dalam kategori yang kurang berhasil dengan baik (Sulbar, Kalsel, Kepri, dan Sultra). Kondisi ini kemungkinan terjadi karena pemprov tersebut belum membangun infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai, antara lain belum membangun jaringan komunikasi (LAN, WAN, dan akses internet), perangkat keras dan lunak pada pengguna, saluran layanan atau *service delivery channel*, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan masyarakat pengguna tidak dapat mengakses semua informasi yang telah disediakan dan diberikan oleh pemprov tersebut secara *online* dengan mudah, cepat dan tepat dari mana saja dan kapan saja, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selain itu, antar pemprov atau pemprov dengan masyarakat, dan pemprov dengan bisnis juga tidak akan dapat melakukan interaksi maupun transaksi elektronik sama sekali.

- (d) **Aspek Aplikasi**, dari 27 pemprov di Indonesia ternyata ada sebanyak 33,3% pemprov telah berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*. Hal ini terlihat dari tingkat capaiannya berada dalam kategori baik (Jatim, DIY, Jabar, DKI Jakarta, Kaltim, Jateng, NTT, Bali, Sumbar). Kondisi ini terjadi karena pemprov tersebut telah memiliki dan membangun berbagai aplikasi yang mendukung layanan *e-Government* baik secara langsung atau tidak langsung, seperti aplikasi pelayanan publik, administrasi dan manajemen, legislasi, pembangunan, keuangan, kepegawaian, pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Meskipun terdapat keberhasilan, namun ternyata masih ada sekitar 55,6% pemprov yang belum berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, karena tingkat capaiannya masih berada dalam kategori kurang baik (Riau, Banten, Papua, Sumsel, Bali, Lampung, Gorontalo, Jambi, Sumut, NTB, NAD, Bengkulu, Kepri, Kalsel,

dan Balbel). Disamping itu, juga masih ada 11,1% pemprov yang justru sangat kurang berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, karena tingkat capaiannya berada dalam kategori yang kurang berhasil dengan baik (Sulsel, Sultra, dan Sulbar). Kondisi ini terjadi kemungkinan karena pemprov tersebut belum/tidak menyediakan ataupun membangun aplikasi yang mendukung layanan *e-Government* atau bahkan sudah menyediakan ataupun membangun tetapi tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan pemprov dan pemangku kepentingan yang dilayani, tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur dan tingkat kompetensi SDM, dan tidak mau mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah. Dengan tidak terbangunnya aplikasi tersebut, mengakibatkan pemprov tersebut tidak dapat melakukan interaksi dengan nyaman, transparan, dan murah antar lembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah dengan masyarakat, dan lembaga pemerintah dengan perusahaan bisnis.

- (e) **Aspek Perencanaan**, dari 27 pemprov di Indonesia ternyata ada sebanyak 33,3% pemprov telah berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*. Hal ini terlihat dari tingkat capainya yang berada dalam kategori baik (Jatim, DIY, Jabar, DKI Jakarta, Kaltim, Jateng, Banten, Papua, Sumsel). Kondisi ini terjadi karena perencanaan pemprov tersebut telah terkait dengan tata kelola dan manajemen perencanaan *e-Government* yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Meskipun terdapat keberhasilan, namun masih ada sekitar 25,9% pemprov di Indonesia yang belum berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, karena tingkat capaiannya berada dalam kategori kurang baik (NTT, Riau, Lampung, Gorontalo, Sultra, NAD, Kepri). Disamping itu, masih

ada 40,8% pemprov yang justru sangat kurang berhasil dengan baik dalam implementasi *e-Government*, karena tingkat capaiannya yang masih berada dalam kategori yang kurang berhasil dengan baik (Bali, Sumber, Jambi, Sumut, NTB, Sulsel, Papua Barat, Bengkulu, Kalsel, Sulbar, Balbel). Kondisi ini dikarenakan pemprov tersebut tidak atau belum menyusun perencanaan yang terkait dengan tata kelola dan manajemen perencanaan *e-Government* yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Dengan tidak adanya perencanaan yang baik, mengakibatkan tidak ada tata cara atau mekanisme kerja yang baku dan teratur dalam implementasi *e-Government*, sehingga implementasi *e-Government* pemprov tersebut tidak mengacu pada tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa mendatang.

#### 4.3 Strategi Pengembangan *E-Government*

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 27 pemprov di Indonesia ternyata lebih dari separuhnya, tingkat capaian implementasi dan pengembangan *e-Government*-nya dapat dikatakan kurang berhasil dengan baik. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya pemprov untuk dipertimbangkan dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh Gubernur selaku pimpinan Pemprov. Oleh karena itu, strategi pengembangan *e-Government* untuk ke depan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan dengan menyusun rencana strategis pengembangan dan implementasi *e-Government* dengan *blueprint* yang jelas pada masing-masing pemprov agar menjadi dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan arah

kebijakan atau tujuan pengembangan *e-Government* di lingkungan pemprovnya. Oleh karena itu, komitmen seorang Gubernur sebagai pimpinan pemprov adalah salah satu faktor kunci keberhasilan yang sangat menentukan dalam implementasi *e-Government* di lingkungan Pemprovnya. Jadi ketersediaan *blueprint* dan variasinya ini sangat penting sebagai *guidline* bagi seorang Gubernur selaku pimpinan Pemprov untuk melakukan pentahapan pengembangan *e-Government*.

- Menyusun dan menempatkan organisasi struktural pada setiap pemprov sesuai dengan karakteristik masing-masing pemprov dengan melengkapi tugas pokok dan fungsi, jenjang karier dan status kepegawaian serta kewenangan yang jelas untuk mempermudah koordinasi pada tingkat eksternal maupun internal. Keberadaan organisasi struktural ini akan menjadi dasar hukum yang akan memperkuat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemprov dalam melakukan koordinasi dan fungsi *Chief Information officer* (CIO) dalam memberikan dukungan teknis pengembangan *e-Government* secara efektif dan efisien.
- Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi yang memadai di lingkungan Pemprovnya, antara lain dengan membangun *website* resmi sebagai media *online* untuk peningkatan komunikasi dan pemberian pelayanan publik, membangun *Local Area Network* (LAN) dan *Wide Area Network* (WAN) serta jaringan privat (*privat network*) yang terkoneksi ke jaringan internet. Melalui infrastruktur ini, Pemprov akan dapat menyediakan akses informasi, dan pelayanan secara efisien pada pihak lain. Model penyampaiannya dapat dilakukan melalui *Government-to-Citizens* (G2C), *Government-to-Business* (G2B), *Government-to-Government* (G2G), dan *Government-to-Employee* (G2E). Penyampaian G2C dan G2B merupa-

kan interaksi eksternal dan kerjasama antara pemerintah dan lembaga di luar pemerintah, sedangkan *government-to-employee* (G2E) dan G2G melibatkan interaksi internal dan kerjasama antara pemerintah dan pegawai pemerintah, serta antara pemerintah pada tingkat dan lokasi yang berbeda.

- Membangun berbagai jenis dan bentuk aplikasi untuk menjalankan fungsi *e-Government* yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pemprov. Aplikasi *e-Government* ini pada dasarnya merupakan susunan piranti lunak yang dirancang dan dibangun oleh Pemprov untuk mendukung proses layanan publik tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna akhir (*end-user*). Oleh karena itu sistem aplikasi *e-Government* yang dibangun oleh Pemprov harus mampu mengakomodasi kuantitas dan kualitas layanan informasi yang akan diberikan kepada publik, baik dalam bentuk layanan *publish*, interaksi ataupun transaksi.
- Merencanakan pengembangan dan implementasi *e-Government* yang berkaitan dengan tata kelola atau manajemen ICT secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan di lingkungan Pemprovnya. Jadi sebelum melakukan implementasi dan pengembangan *e-Government* harus ada proses perencanaan yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekanisme kerja yang baku dan teratur). Disamping itu perlu melakukan kajian kebutuhan dan strategi penerapan ICT secara lengkap yang berisi sasaran/tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang. Oleh karena itu implementasi pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan *e-Government* harus benar-benar mengacu pada rencana pengembangan yang telah disusun atau direncanakan sebelumnya.

Bagaimana dengan pengembangan *e-Government* di Lapan? Lapan sebagai lembaga pemerintah dan sekaligus sebagai badan publik juga telah melakukan pengembangan *e-Government*, antara lain telah melakukan pembangunan *website* sebagai media komunikasi internal dan eksternal, pembangunan infrastuktur jaringan komunikasi dan informasi yang mengoneksikan unit kerja Lapan, penyusunan organisasi struktural setingkat Eselon IV yang lengkap dengan tugas pokok dan fungsinya, pembangunan beberapa aplikasi (kepegawaian, rekrutmen pegawai, absensi). Kemajuan memang telah berhasil dicapai Lapan, namun apabila dibandingkan dengan tingkat capaian pengembangan *e-Government* pemprov-pemprov di Indonesia tersebut, ternyata masih jauh tertinggal dan kalah cepat. Oleh karena itu mengacu keberhasilan pemprov tersebut, sudah semestinya saat ini Lapan sebagai lembaga pemerintah harus segera meningkatkan implementasi dan pengembangan *e-Government* Lapan untuk mendukung pengembangan *e-Government* di Indonesia guna meningkatkan pelayanan kepada publik, dengan cara sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan dengan menyusun *blueprint e-Government* Lapan sebagai pedoman dalam menentukan arah atau tujuan pengembangan *e-Government* di lingkungan Lapan. Kebijakan Pimpinan LAPAN merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan yang sangat menentukan dalam implementasi *e-Government* di lingkungan Lapan. Dalam hal ini, Pimpinan Lapan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dituntut untuk menyusun konsep pembangunan dan pengembangan *e-Government*, karena komitmen Pimpinan Lapan akan dapat mempercepat terwujudnya pengembangan *e-Government* di lingkungan Lapan. Komitmen pimpinan Lapan untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government* ini tentunya bukan hanya

sekedar mengikuti tren, karena tanpa adanya *political will* dari pimpinan tertinggi Lapan maka mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* di Lapan dapat berjalan dengan mulus.

- Meningkatkan kelembagaan ICT yang bertanggung jawab dalam pengembangan *e-Government* Lapan (saat ini setingkat Eselon IV) menjadi setingkat Eselon II (tingkat Pusat) yang dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas. Peningkatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memperkuat kedudukan Lapan dalam melakukan koordinasi dengan seluruh Unit Kerja Lapan, menjalankan fungsi *Chief Information Officer* (CIO), memberikan dukungan teknis dan fungsi-fungsi lain secara efektif dan efisien dalam pengembangan *e-Government*. Dengan demikian kelembagaan ICT Lapan tersebut dapat melakukan tata kelola ICT, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan, dan pengendalian dalam mendukung pengembangan *e-Government* untuk Lapan.
- Membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi yang memadai untuk mendukung peningkatan layanan publik, yakni antara *Government-to-Government* (G2G), *Government-to-Business* (G2B), *Government-to-Citizens* (G2C), dan *Government-to-Employee* (G2E). Infrastruktur jaringan ini, antara lain berupa situs (situs interaktif dengan publik, situs transaksi pelayanan publik), *webmail*, *Local Area Network* (LAN) dan *Wide Area Network* (WAN) serta jaringan privat (*privat network*) yang mengoneksikan Lapan ke jaringan global atau internet.
- Membangun berbagai aplikasi untuk mendukung fungsi *e-Government* yang mampu memberikan peningkatan layanan kepada publik, secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk layanan publikasi, interaksi maupun transaksi. Dengan aplikasi tersebut, LAPAN sebagai lembaga pemerintah

dan sekaligus sebagai badan publik dalam memberikan layanan interaksi dan layanan transaksi elektronik serta penyediaan informasi publik akan dapat diakses oleh masyarakat secara *online* dengan berbasis *web* selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu. Untuk itulah maka pemerintah (dalam hal ini LAPAN) harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan manfaat yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya (Indrajit; Richardus Eko, 2002).

- Merencanakan pengembangan *e-Government* LAPAN yang terkait dengan tata kelola atau manajemen ICT secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, LAPAN dalam pembangunan dan pengembangan *e-Government* harus selalu mengacu pada standar yang baku dalam implementasi dan pengembangan *e-Government* yang telah direncanakan.

## 5 KESIMPULAN

- Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  $\chi_r^2 = 26,923$  lebih besar dari nilai Chi-Kuadrat tabel  $\chi_{\alpha, k=1}^2 = 9,488$  untuk derajat kebebasan (db) = (k-1) dengan tingkat signifikansi  $\alpha=0,05$ . Ini berarti terdapat perbedaan tingkat capaian implementasi *e-Government* pada pemprov di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Untuk aspek kebijakan (51,18%), kelembagaan (62,9%), infrastruktur (59,3%), dan aplikasi (55,6) ternyata lebih dari separuh tingkat capaiannya kurang berhasil dengan baik, bahkan untuk aspek perencanaan (40,8%) justru sangat kurang berhasil.
- Strategi pengembangan *e-Government* oleh pemprov dapat dilakukan dengan cara: (a) Merumuskan kebijakan dengan menyusun rencana strategis pengembangan dan implementasi *e-Government*

dengan *blueprint* yang jelas pada masing-masing pemprov, (b) Menyusun dan menempatkan organisasi struktural pada setiap pemprov sesuai dengan karakteristik masing-masing pemprov dengan melengkapi tugas pokok dan fungsi, jenjang karier dan status kepegawaian serta kewenangan yang jelas, (c) Mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi yang memadai, (d) Membangun berbagai jenis dan bentuk aplikasi untuk menjalankan fungsi *e-Government* yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pemprov, dan (e) Merencanakan pengembangan dan implementasi *e-Government* yang berkaitan dengan tata kelola atau manajemen ICT secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

- LAPAN sebagai lembaga pemerintah juga perlu mendukung pengembangan *e-Government* di Indonesia, dengan cara: (a) Menyusun *blueprint e-Government* LAPAN dengan jelas, karena kebijakan dan *political will* dari pimpinan LAPAN merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pengembangan *e-Government*, (b) Meningkatkan kelembagaan ICT LAPAN (saat ini setingkat Eselon IV) menjadi setingkat Eselon II (tingkat Pusat) yang dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, (c) Membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi yang memadai untuk peningkatan layanan publik, antara G2G, G2B, G2C, dan G2E, (d) Membangun berbagai jenis aplikasi *e-Government* berdasarkan prioritas dan manfaat yang dirasakan masyarakat, dan (e) Merencanakan pengembangan *e-Government* LAPAN yang terkait dengan tata kelola atau manajemen ICT secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

Hasil penelitian ini disarankan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para Gubernur di Indonesia sebagai pimpinan pemprov

untuk mempercepat terwujudnya pengembangan *e-Government* di lingkungan Lembaganya, dan juga bagi Pimpinan LAPAN dalam merumuskan kebijakan implementasi dan pengembangan *e-Government* LAPAN untuk mendukung pengembangan *e-Government* di Indonesia pada masa mendatang.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bank Dunia, 2002. *E-Government: A Definition of e-Government*, <http://www.worldbank.org/publicsector/e-Government/definition.html>.
- Djarwanto, 1995. *Statistik Non Parametrik*, Yogyakarta:BPFE, Hal 66.
- Hartono; Dwiwarso Utomo; Edy Mulyanto., 2010. *Electronic Government Pem-berdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web*, dalam Jurnal Teknologi Informasi 6(1) April 2010, hal. 9-21.
- Hasibuan, Zainal A., 2012. *Integrated Government ICT Strategy*. Makalah disampaikan pada Workshop *e-Government* di Hotel Melia, Jakarta, 19 Maret 2012.
- Holle, Erick S., 2011. *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya meminimalisir praktek maladministrasi dalam meningkatkan public service*, dalam Jurnal Sasi, Juli-September Vol.17 No.3, hal. 21-30.
- Indrajit, Richardus Eko., 2002. *Electroninc Government: Strategi pengembangan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang *Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Junaidi, 2011. *Dukungan E-Government Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah: Kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia*. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 *LAB-ANE FISIP Untirta*, hal. 89-98.
- Karniawati, Nia; Romi Rahmadani., 2011. *Analisis Kebijakan Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat*, dalam Malajah Ilmiah Unikom Vol. 7 No. 2 hal. 233.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2010. *Komunikasi dan Informatika Indonesia Whitepaper 2010*, Jakarta: Pusat Data Kementrian Komunikasi dan Informatika.
- Rahardjo, Budi., 2001. *Membangun e-Government*, Makalah pada Seminar Nasional Jaringan Komputer II, yang diselenggarakan oleh Technic Study Club, STMIK Dipanegara Makassar, 19 Mei 2001. hal. 1. [http://www.geocities.com/seminar\\_tsc](http://www.geocities.com/seminar_tsc). Diambil tanggal 15 April 2011.
- Satriya, Eddy., 2006. *Pentingnya Revitali-sasi E-Government di Indonesia*. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Indonesia, 3-4 Mei 2006, Aula Barat dan Timur Institut Teknologi Bandung, hal 38-43.
- Sembiring, Irwan.; Jazi Eko Istiyanto, 2005. *Piranti Bantu Pendukung Pengambilan Keputusan Kelayakan Investasi e-Government*. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia, ITB, 3-4 Mei 2005, hal. 81-86
- Sosiawan, Edwi Arief., 2008. *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Pemerintah Daerah di Indonesia: Perspektif Content dan Manajemen*. Seminar Nasional Informatika 2008 (semnasIF 2008), UPN "Veteran" Yogyakarta, 24 Mei 2008 , hal. 88-98.

- Sosiawan, Edwi Arief., 2012. *Tantangan dan Hambatan dalam implementasi E-Government di Indonesia*. UPN "Veteran" Yogyakarta, [http://:edwi.dosen.upnyk.ac.id](http://edwi.dosen.upnyk.ac.id). Diambil tanggal 15 Agustus 2012.
- Sufianti, Ely., 2007. *Aplikasi e-Government Dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. V, No.4 Desember 2007, hal. 356-371
- Yalia, Mulyono., 2011. *Menuju Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dengan E-Government*, Observasi, 9(2), hal. 65-74.